

## **VALUE FOR MONEY PAJAK REKLAME DAN PENERANGAN JALAN KOTA DENPASAR DAN KABUPATEN BADUNG**

**Ni Wayan Supriyanti<sup>1</sup>  
I Ketut Yadnyana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
email: tgs\_yanti@yahoo.com / Telp: +62 8563718745

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perbandingan penerapan konsep *value for money* dalam penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tingkat ekonomis dan efisiensi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tergolong sangat efisien. Tingkat efektivitas Kota Denpasar dalam penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan serta efektivitas Kabupaten Badung dalam penerimaan pajak penerangan jalan tergolong sangat efektif, tetapi efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung tergolong cukup efektif.

**Kata Kunci:** *value for money*, pajak reklame, pajak penerangan jalan

### **ABSTRACT**

The purpose of this research is to know the comparative degree application of the concept of value for money in tax revenues ads and tax of roads between towns denpasar with district badung 2009-2013 years. Engineering analysis used is technique quantitative analysis by uses statistics descriptive. Based on the analysis known that level economical and efficiency city denpasar and regent badung in tax revenues reeklame and tax of roads were very efficient. Level effectiveness city denpasar in tax revenues ads and street lighting and effectiveness district badung in tax revenues street lighting were very effective, but effectiveness acceptance of tax revenues in thousand badung appertain very effective.

**Key Words:** *value for money*, billboard tax, tax of roads

### **PENDAHULUAN**

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di Indonesia mulai melaksanakan Otonomi Daerah (Otda) atau era desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan desentralisasi sering tergantung pada regionalisme yang melibatkan masyarakat daerah yang ikut berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada daerah mereka dimasa yang akan datang (Dore dan Woodhill, 1999). Dalam arti luas, desentralisasi berarti devolusi yang bermakna transfer kewenangan pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada quasi unit otonom dari pemerintah daerah dengan status korporasi (Litvack dan Seddon, 1998).

Untuk memaksimalkan penerimaan dan penggunaan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus mampu mengatur sumber dana dan sumber daya yang tersedia dengan konsep *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2002). Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung juga memberlakukan Otonomi Daerah dalam menjalankan pemerintahan. Kabupaten Badung menduduki posisi teratas sebagai daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi dari Sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari Tahun 2008-2012 (dalamribuan rupiah)**

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Badung	449.674.873	850.170.021	979.241.565	1.406.298.000	1.870.187.200
Denpasar	176.072.308	215.156.916	257.899.899	424.959.413	511.326.621
Gianyar	96.922.244	112.380.710	153.617.895	175.273.316	261.222.178
Tabanan	87.379.829	93.840.478	107.836.348	141.046.017	183.295.007
Buleleng	52.662.170	63.487.192	86.962.002	109.167.026	129.003.995
Karangasem	43.005.827	47.842.960	62.696.409	129.556.195	144.019.629
Klungkung	29.028.565	29.566.917	31.331.319	40.735.839	48.561.525
Jembrana	21.235.505	33.952.879	34.380.823	41.330.606	46.470.111
Bangli	12.655.751	16.329.747	16.252.951	22.961.237	40.751.050

Su

mber: *Badan Pusat Statistik, 2014 (data diolah)*

Dari Tabel 1 diatas terlihat bahwa setiap tahun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung selalu berada diposisi pertama dan Kota Denpasar selalu berada pada posisi kedua. Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah dari Kabupaten Badung sebesar Rp. 1.870.187.200.000, sedangkan Kota Denpasar yang berada pada posisi kedua dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 511.326.621.000 pada tahun 2012.

Penerimaan untuk pajak reklame dan penerangan jalan di Kota Denpasar selalu melebihi target dari tahun 2009 sampai tahun 2013 tetapi untuk di Kabupaten Badung penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan pernah berada dibawah target, yaitu pada tahun 2012 dan 2013 untuk pajak reklame yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut:

**Tabel 2.**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Kota Denpasar Tahun 2009-2013 (dalam rupiah)**

Tahun	Pajak Reklame		Pajak Penerangan Jalan	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2009	6.800.000.000	11.198.916.710	25.000.000.000	28.611.433.715
2010	11.500.000.000	13.664.517.133	30.000.000.000	34.159.164.510
2011	13.000.000.000	14.662.992.124	36.500.000.000	39.963.905.608
2012	15.500.000.000	17.378.787.516	40.000.000.000	44.767.611.297
2013	9.258.600.000	9.647.337.300	52.000.000.000	55.731.803.273

*Sumber: Laporan Target dan Realisasi Kota Denpasar, 2014*

**Tabel 3.**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013 (dalam rupiah)**

Tahun	Pajak Reklame		Pajak Penerangan Jalan	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2009	6.000.000.000	6.442.117.713	44.343.644.974	46.664.806.014
2010	6.560.000.000	6.878.766.556	53.908.920.466	55.202.225.235
2011	7.200.000.000	7.855.373.253	61.000.000.000	57.848.743.299
2012	7.500.000.000	3.222.528.031	62.697.906.151	64.315.694.927
2013	7.500.000.000	160.155.115	73.070.033.670	83.270.114.851

*Sumber: Laporan Target dan Realisasi Kabupaten Badung, 2014*

Dari Tabel 2 dan 3 terlihat bahwa pada tahun 2012, penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung ditargetkan sebesar Rp. 7.500.000.000 tetapi hanya terealisasi sebesar Rp. 3.222.528.031, sedangkan untuk tahun 2013 target pemungutan pajak reklame di Kabupaten Badung sebesar Rp. 7.500.000.000, tetapi hanya terealisasi sebesar Rp. 6.606.523.205. Pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Badung juga sempat berada dibawah target, yaitu pada tahun 2011. Pada

tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan target untuk pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 61.000.000.000, tetapi yang terealisasi hanya Rp. 57.848.743.299. Hal tersebut menimbulkan ketertarikan untuk meneliti penerapan *value for money* dalam penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan dan melihat apakah terdapat perbedaan dalam penerapan *value for money* penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan dari kedua daerah ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana *value for money* dalam penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung?
- 2) Apakah ada perbedaan *value for money* penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung?

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian dari penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Letda Made Tantular No. 12 Renon dan Dinas Pendapatan Kabupaten Badung di Pusat Pemerintahan Badung Mangupraja Mandala yang beralamat di Jalan Raya Sempidi, Mengwi. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi non partisipan dan teknik analisis data analisis kuantitatif dan uji statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tingkat ekonomis dapat diukur dengan menggunakan rasio ekonomi, yaitu dengan membandingkan realisasi biaya dalam pemungutan pajak reklame dan penerangan jalan dengan anggaran biaya dalam pemungutan pajak reklame dan penerangan jalan. Rasio ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Nugrahini, 2007):

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{realisasi biaya untuk memungut pajak}}{\text{anggaran biaya untuk memungut pajak}} \times 100\% \dots \dots (1)$$

Tingkat ekonomis dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan disajikan dalam tabel 4 dan tabel 5 berikut:

**Tabel 4.**  
**Rasio Ekonomi atas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan di Kota Denpasar Tahun 2009-2013**

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Ekonomi (%)	Pajak Penerangan Jalan		Rasio Ekonomi (%)
	Anggaran Biaya (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)		Anggaran Biaya (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)	
2009	65.295.000	49.441.000	76	6.500.000	4.825.500	74
2010	70.000.000	64.329.500	92	6.700.000	5.240.000	78
2011	76.360.000	65.246.000	85	7.250.000	6.100.500	84
2012	80.260.000	69.014.000	86	7.850.000	6.450.000	82
2013	90.285.000	86.901.000	96	8.200.000	7.300.000	89
rata-rata	382.200.000	334.931.500	88	7.300.000	5.983.200	82

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2014 (data diolah)*

**Tabel 5.**  
**Rasio Ekonomi atas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Badung Tahun 2009-2013**

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Ekonomi (%)	Pajak Penerangan Jalan		Rasio Ekonomi (%)
	Anggaran Biaya (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)		Anggaran Biaya (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)	
2009	40.500.000	32.675.000	81	5.300.000	4.285.000	81
2010	47.250.000	35.985.000	76	5.850.000	4.985.000	85
2011	53.400.000	41.447.000	78	6.600.000	5.340.000	81
2012	60.000.000	56.670.000	94	7.240.000	5.900.000	81
2013	64.600.000	59.820.000	93	8.100.000	6.890.000	85
rata-rata	53.150.000	45.319.400	85	6.618.000	5.480.000	83

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2014 (data diolah)*

Tabel 4 memperlihatkan bahwa rata-rata rasio ekonomi Kota Denpasar dalam penerimaan pajak reklame sebesar 88% dan 82% untuk pajak penerangan jalan. Tabel 5 memperlihatkan bahwa rata-rata rasio ekonomi Kabupaten Badung dalam penerimaan pajak reklame sebesar 85% dan 83% untuk pajak penerangan jalan. Sesuai dengan kriteria kinerja keuangan, rata-rata rasio ekonomi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013 untuk penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang ditunjukkan oleh Tabel 4 dan 5 tergolong ekonomis. Rata-rata tergolong ekonomis karena menunjukkan nilai rasio dibawah 100%.

Analisis tingkat efisiensi dapat diukur dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan dengan realisasi biaya dalam pemungutan pajak reklame dan penerangan jalan. Rasio ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Dewi, 2010):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak}}{\text{realisasi penerimaan pajak}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Tingkat efisiensi dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan disajikan dalam Tabel 6 dan Tabel 7 berikut:

**Tabel 6.**  
**Rasio Efisiensi Atas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan di Kota Denpasar Tahun 2009-2013**

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Efisiensi (%)	Pajak Penerangan Jalan		Rasio Efisiensi (%)
	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)		Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)	
2009	11.198.916.710	49.441.000	0,441	28.611.433.715	4.825.500	0,017
2010	13.664.517.133	64.329.500	0,471	34.159.164.510	5.240.000	0,015
2011	14.662.992.124	65.246.000	0,445	39.963.905.608	6.100.500	0,015
2012	17.378.787.516	69.014.000	0,397	44.767.611.297	6.450.000	0,014
2013	9.647.337.300	86.901.000	0,901	55.731.803.273	7.300.000	0,013
rata-rata	13.310.510.157	66.986.300	0,531	40.646.783.681	5.983.200	0,015

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2014 (data diolah)*

**Tabel 7.**  
**Rasio Efisiensi Atas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Badung Tahun 2009-2013**

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Efisiensi (%)	Pajak Penerangan Jalan		Rasio Efisiensi (%)
	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)		Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)	
2009	6.442.117.713	32.675.000	0,507	46.664.806.014	4.285.000	0,009
2010	6.878.766.556	35.985.000	0,523	55.202.225.235	4.985.000	0,009
2011	7.855.373.253	41.447.000	0,528	57.848.743.299	5.340.000	0,009
2012	3.222.528.031	56.670.000	1,759	64.315.694.927	5.900.000	0,009
2013	6.606.523.205	59.820.000	0,905	83.270.114.851	6.890.000	0,008
rata-rata	6.201.061.752	45.319.400	0,731	61.460.316.865	5.480.000	0,009

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2014 (data diolah)*

Tabel 6 dan Tabel 7 memperlihatkan rata-rata rasio efisiensi untuk penerimaan pajak reklame Kota Denpasar sebesar 0,531% dan Kabupaten Badung



sebesar 0,731% Tahun 2009-2013. Rata-rata rasio efisiensi untuk penerimaan pajak penerangan jalan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 2009-2013 sebesar 0,015% dan 0,009. Sesuai dengan kriteria kinerja keuangan, rata-rata rasio efisiensi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan Tahun 2009-2013 yang ditunjukkan oleh tabel 6 dan tabel 7 tergolong sangat efisien. Rata-rata tergolong sangat efisien karena menunjukkan nilai rasio dibawah 60%. Rasio efisiensi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013 tidak memiliki nilai rasio yang berfluktuasi.

Analisis tingkat efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan dengan target penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan. Rasio ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Julastiana, 2012):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\% \dots \dots (3)$$

Tingkat efektivitas dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan disajikan dalam Tabel 8 dan Tabel 9 berikut:

**Tabel 8.**  
**Rasio Efektivitas Atas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan di Kota Denpasar Tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Efektivitas (%)	Pajak Penerangan Jalan		Rasio Efektivitas (%)
	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)		Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	
2009	6.800.000.000	11.198.916.710	165	25.000.000.000	28.611.433.715	114
2010	11.500.000.000	13.664.517.133	119	30.000.000.000	34.159.164.510	114
2011	13.000.000.000	14.662.992.124	113	36.500.000.000	39.963.905.608	109
2012	15.500.000.000	17.378.787.516	112	40.000.000.000	44.767.611.297	112
2013	9.258.600.000	9.647.337.300	104	52.000.000.000	55.731.803.273	107
rata-rata	11.211.720.000	13.310.510.157	119	36.700.000.000	40.646.783.681	111

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2014 (data diolah)*

**Tabel 9.**  
**Rasio Efektivitas Atas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Badung Tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Efektivitas (%)	Pajak Penerangan Jalan		Rasio Efektivitas (%)
	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)		Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	
2009	6.000.000.000	6.442.117.713	107	44.343.644.974	46.664.806.014	105
2010	6.560.000.000	6.878.766.556	105	53.908.920.466	55.202.225.235	102
2011	7.200.000.000	7.855.373.253	109	61.000.000.000	57.848.743.299	95
2012	7.500.000.000	3.222.528.031	43	62.697.906.151	64.315.694.927	103
2013	7.500.000.000	6.606.523.205	88	73.070.033.670	83.270.114.851	114
rata-rata	6.952.000.000	6.201.061.752	89	59.004.101.052	61.460.316.865	104

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2014 (data diolah)*

Tabel 8 memperlihatkan rata-rata rasio efektivitas Kota Denpasar Tahun 2009-2013 dalam penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan adalah sebesar 119 % dan 111%. Sesuai dengan kriteria kinerja keuangan, rata-rata rasio efektivitas Kota Denpasar Tahun 2009-2013 yang ditunjukkan oleh Tabel 8 tergolong sangat efektif. Rata-rata tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%.

Tabel 9 memperlihatkan rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Badung Tahun 2009-2013 dalam penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan, yaitu sebesar 89%

dan 104%. Sesuai dengan kriteria kinerja keuangan, rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Badung untuk penerimaan pajak penerangan jalan Tahun 2009-2013 yang ditunjukkan oleh Tabel 9 tergolong sangat efektif. Rata-rata tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%. Tetapi, rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Badung untuk penerimaan pajak reklame tahun 2009-2013 tergolong cukup efektif. Rata-rata tergolong cukup efektif karena menunjukkan nilai rasio 80%-90%.

Perbandingan penerapan *value for money* penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dapat dilihat dari hasil uji beda yang dilakukan. Pengujian normalitas sebaran data dilakukan dengan menggunakan uji *Shapiro-Wilk*. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data, karena salah satu syarat dari analisis statistik adalah bahwa data yang dianalisis mengikuti distribusi normal, apabila data berdistribusi normal menggunakan statistik parametrik, bila tidak normal menggunakan non parametrik. Dari hasil pengujian *Shapiro-Wilk* didapatkan data untuk rasio ekonomi dan efektivitas berdistribusi normal sehingga dilakukan uji *t-test* sedangkan untuk data rasio efisiensi tidak berdistribusi normal sehingga dilakukan uji beda *mann-whitney test*.

a) **Menguji Perbedaan Ekonomis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013**

Hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan ekonomis Pajak Reklame antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-

2013. Untuk menguji hipotesis ini, menggunakan Uji *t-test* dengan bantuan program *SPSS 15.00 for Windows*.

Hasil uji *t-test* menunjukkan nilai probabilitas rasio ekonomi untuk pajak reklame adalah 0,624. Dengan menggunakan uji dua sisi maka nilai probabilitas dan taraf kepercayaan dibagi 2, maka nilai probabilitas  $0,624/2 = 0,312$  ini lebih besar dari  $0,05/2=0,025$  ( $0,312 > 0,025$ ). Hipotesis yang berbunyi tidak terdapat perbedaan ekonomis pajak reklame antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013, diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rasio ekonomis dalam penerimaan pajak reklame antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013.

**b) Menguji Perbedaan Ekonomis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013**

Hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan ekonomis Pajak Penerangan Jalan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013. Untuk menguji hipotesis ini, menggunakan Uji beda *t-test* dengan bantuan program *SPSS 15.00 for Windows*.

Hasil uji bahwa nilai probabilitas rasio ekonomi untuk pajak penerangan jalan adalah 0,679. Dengan menggunakan uji dua sisi maka nilai probabilitas dan taraf kepercayaan dibagi 2, maka nilai probabilitas  $0,679/2 = 0,339$  ini lebih besar dari  $0,05/2=0,025$  ( $0,339 > 0,025$ ). Hipotesis yang berbunyi tidak terdapat perbedaan ekonomis pajak reklame antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013, diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

perbedaan rasio ekonomis dalam penerimaan pajak penerangan jalan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013.

**c) Menguji Perbedaan Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013**

Hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan efisiensi Pajak Reklame antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013. Untuk menguji hipotesis ini, menggunakan Uji beda *Mann-Whitney Test* dengan bantuan program *SPSS 15.00 for Windows* karena data untuk rasio efisiensi tidak berdistribusi normal.

Hasil uji *mann-whitney test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas rasio efisiensi untuk pajak reklame adalah 0,015. Dengan menggunakan uji dua sisi maka nilai probabilitas dan taraf kepercayaan dibagi 2, maka nilai probabilitas  $0,015/2 = 0,0075$  ini lebih kecil dari  $0,05/2=0,025$  ( $0,0075 < 0,025$ ). Hipotesis yang berbunyi tidak terdapat perbedaan efisiensi pajak reklame antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013, ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio efisiensi dalam penerimaan pajak reklame antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013.

**d) Menguji Perbedaan Efisiensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013**

Hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan efisiensi Pajak Penerangan Jalan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013. Untuk menguji hipotesis ini, menggunakan Uji beda *Mann-Whitney Test* dengan

bantuan program *SPSS 15.00 for Windows* karena data untuk rasio efisiensi untuk pajak penerangan jalan tidak berdistribusi normal.

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas rasio efisiensi untuk pajak penerangan jalan adalah 1. Dengan menggunakan uji dua sisi maka nilai probabilitas dan taraf kepercayaan dibagi 2, maka nilai probabilitas  $1/2 = 0,5$  ini lebih besar dari  $0,05/2=0,025$  ( $0,5 > 0,025$ ). Hipotesis yang berbunyi tidak terdapat perbedaan efisiensi pajak penerangan jalan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013, diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rasio efisiensi dalam penerimaan pajak penerangan jalan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013.

**e) Menguji Perbedaan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013**

Hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan efektivitas Pajak Reklame antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013. Untuk menguji hipotesis ini, menggunakan Uji *bedat-test* dengan bantuan program *SPSS 15.00 for Windows*.

Hasil uji *t-test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas rasio efektivitas untuk pajak reklame adalah 0,088. Dengan menggunakan uji dua sisi maka nilai probabilitas dan taraf kepercayaan dibagi 2, maka nilai probabilitas  $0,088/2 = 0,044$  ini lebih besar dari  $0,05/2=0,025$  ( $0,044 > 0,025$ ). Hipotesis yang berbunyi tidak terdapat perbedaan efektivitas pajak reklame antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013, diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

perbedaan rasio efektivitas dalam penerimaan pajak reklame antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013.

**f) Menguji Perbedaan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013**

Hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan efektivitas Pajak Penerangan Jalan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013. Untuk menguji hipotesis ini, menggunakan Uji *bedat-test* dengan bantuan program *SPSS 15.00 for Windows*.

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas rasio efektivitas untuk pajak penerangan jalan adalah 0,069. Dengan menggunakan uji dua sisi maka nilai probabilitas dan taraf kepercayaan dibagi 2, maka nilai probabilitas  $0,069/2 = 0,0345$  ini lebih besar dari  $0,05/2=0,025$  ( $0,0345 > 0,025$ ). Hipotesis yang berbunyi tidak terdapat perbedaan efektivitas pajak reklame antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013, diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rasio efektivitas dalam penerimaan pajak penerangan jalan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan menggunakan konsep *Value for Money*, ditinjau dari rasio ekonomi untuk pajak reklame dan penerangan jalan adalah tergolong ekonomis, ditinjau dari rasio efisiensi untuk pajak

reklame dan penerangan jalan tergolong sangat efisien, dan ditinjau dari rasio efektivitas adalah tergolong sangat efektif, untuk pajak reklame dan penerangan jalan Kota Denpasar, serta untuk pajak penerangan jalan Kabupaten Badung. Tetapi, rasio efektivitas untuk penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung tergolong cukup efektif.

Penerapan *Value for Money* dalam penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan ekonomis dan efektivitas dalam penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan serta tidak terdapat perbedaan efisiensi dalam penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013. Tetapi, terdapat perbedaan efisiensi dalam penerimaan pajak reklame di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 2009-2013.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diberikan saran, Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung perlu meningkatkan beberapa hal diantaranya: Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung perlu mengadakan evaluasi dalam penggunaan biaya yang dikeluarkan saat memungut pajak. Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung perlu mempertimbangkan kembali penetapan jumlah target penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan karena dalam penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan Kabupaten Badung sempat tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan melakukan pertimbangan terhadap penetapan jumlah target penerimaan, diharapkan semakin banyak juga nilai realisasi yang akan didapatkan.



## REFERENSI

- Arsana, I Made Arsa dan Dicriyani, Ni Luh Gede Mahayu. 2010. *Value for Money Audit* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sektor Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan. Politeknik Negeri Bali.
- Dewi, Ni Ketut Novi Trisna dan Eka Ardhani Sisdyani. 2012. Penilaian Kinerja atas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Dore, J and J, Woodhill. 1999 : Regionalism, Sustainable Regional Development (Executive Summary of the Final Report), Greening Australia, p.15-18.
- Julastiana, Yaneka dan I Wayan Suartana. 2012. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Litvack, J & Seddon. 1998, Decentralisation Briefing Notes, *World Bank Institute, Working papers in collaboration with Prem Network*, (on line), available at: [www.Gtzsfdm.or.id/lib\\_pa\\_doc\\_on\\_dec.htm](http://www.Gtzsfdm.or.id/lib_pa_doc_on_dec.htm).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugrahani, Tri Siwi. 2007. Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam *AKMENIKA UPY*. 1: h: 1-17.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.